

ABSTRAK

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI BAWASLU KOTA BINJAI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Binjai menetapkan Keputusan Ketua Nomor 110/HM.01.01/K.SU-26/10/2024 mengenai Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam rangka menyukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Pembentukan Pokja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan dukungan lintas sektoral dalam mengawasi integritas serta netralitas aparatur negara selama jalannya tahapan Pilkada di wilayah Kota Binjai. Struktur keanggotaan Pokja ini bersifat kolaboratif, melibatkan unsur internal Bawaslu Kota Binjai (Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, dan Staf) serta unsur eksternal dari Pemerintah Kota Binjai, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pokja ini memiliki mandat penting untuk melakukan pengawasan langsung, mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran, serta memproses dan menindaklanjuti setiap informasi dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI, maupun Polri secara profesional. Segala biaya operasional dan pelaksanaan tugas Pokja ini dibebankan secara sah pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai. Melalui sinergi ini, Pokja diharapkan mampu menjaga netralitas birokrasi, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta mewujudkan iklim pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan demokratis di Kota Binjai.

Kata Kunci: *Bawaslu Kota Binjai, Pokja Netralitas, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pemilihan Kepala Daerah 2024, Pengawasan Pemilu.*